

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta, peneliti menyimpulkannya kedalam beberapa bagian. Sehingga untuk mempermudah dalam menyimpulkannya, peneliti membagi bagian kesimpulan tersebut berdasarkan dengan beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan dapat dilihat pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik, maka pada saat pelaksanaan semuanya dapat berjalan dengan baik pula, oleh karena itu kawasan kumuh di Kota Yogyakarta semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pada indikator pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sudah berhasil. Adapun untuk melihat tingkat keberhasilan yang dilakukan dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam memperlancar berjalannya program penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan cara sosialisasi dan musyawarah. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala karena pada saat perencanaan kegiatan masyarakat harus ikut terlibat didalamnya, dan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat percaya bahwa program yang akan dilakukan memiliki tujuan yang baik.

Kunci kesuksesan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta kepada masyarakat dilakukan dengan cara merangkul tokoh masyarakatnya terlebih dahulu. Kemudian para tokoh masyarakat beserta para komunitas diberikan arahan terlebih dahulu kemudian baru disampaikan kepada masyarakat, sehingga pada saat tahap perencanaan masyarakat tidak banyak mengalami kendala karena sebelumnya sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat dan para komunitas.

2. Sumberdaya

Dalam hal sumberdaya baik itu sumber dana, sumber daya masyarakat dan fasilitas sarana prasarana, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sudah berusaha sebaik mungkin dalam memaksimalkan ketiga hal tersebut. Banyak sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani permukiman kumuh termasuk dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian dalam hal sumber daya manusia, Dinas PU bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat memberikan tambahan berupa softskill yang akan berguna bagi masyarakat dalam menambah penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3. Disposisi

Dalam hal disposisi, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah Kota Yogyakarta selalu tanggap tentang permasalahan permukiman kumuh. Hal tersebut bisa dibuktikan dari menurunnya kawasan

kumuh di Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menargetkan pada tahun 2019 di Kota Yogyakarta sudah terbebas dari kawasan kumuh. Oleh karena itu pemerintah dan juga masyarakat diharapkan dapat berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sudah memiliki Standart Operational Procedure (SOP). Dalam melaksanakan kegiatan yang berjalan SOP ini dijadikan pedoman agar tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai. SOP yang baik adalah ketika pelaksana memahami isi dari SOP tersebut dan melaksanakan kebijakan sesuai isi SOP. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membuat SOP sudah berjalan dengan baik karena SOP yang dibuat sudah jelas baik menyangkut sistem, mekanisme maupun prosedur pelaksanaan.

Kemudian pada faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, dimana Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Kuantitas dan Kualitas sumberdaya

sudah berhasil menciptakan kualitas dan kuantitas sumberdaya dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelatihan yang sering dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat bukan hanya diberikan pelatihan saja tetapi diberikan kepercayaan untuk membuat kelompok UKM yang didanai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat akan berkembang dan mendapatkan penghasilan lebih untuk kebutuhannya.

2. Kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain dalam pencegahan permukiman kumuh

Dalam hal kerjasama, pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, tujuan dilakukannya kerjasama itu agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kepada masyarakat yang tinggal di daerah permukiman kumuh. Sehingga diharapkan pemerintah harus terus menjaga kolaborasi tersebut agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan di Kota Yogyakarta ini banyak sekali investor yang masuk sehingga pemerintah harus memanfaatkan hal tersebut.

3. Kejelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011 juga menjamin mengenai kehidupan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan pada permukiman kumuh dimulai dari pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali, apabila berjalan sesuai yang diharapkan maka masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungannya agar tidak kumuh kembali.

Kemudian pada faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, dimana Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Minimnya anggaran

Anggaran yang minim sudah menjadi hal yang biasa, karena pada tahap perencanaan, disitu sudah di tetapkan anggaran yang akan digunakan akan tetapi pada saat anggaran itu sudah keluar terkadang ada yang kurang. Apabila anggaran yang keluar tidak sesuai dengan kebutuhan maka Dinas PU mengatasi masalah tersebut dengan penanganan skala prioritas, jadi dilihat dulu daerah mana yang masuk dalam prioritas maka harus di selesaikan terlebih dahulu.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kawasan kumuh

Partisipasi masyarakat yang masih rendah banyak dijumpai, hal itu biasanya dikarenakan faktor pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Biasanya masyarakat yang berpendidikan rendah dan penghasilannya rendah enggan untuk berpartisipasi, dan pada saat musyawarah terkadang sering tidak hadir. Oleh karena itu Dinas PU mengajak para tokoh masyarakat agar dapat menyampaikan semaksimal mungkin agar masyarakat yang partisipasinya rendah dapat mengetahui bahwa penanganan permukiman kumuh itu harus dilakukan agar Kota Yogyakarta dapat terbebas dari permasalahan kumuh.

3. Pola pikir Masyarakat

Kemudian hambatan yang terakhir ada pada pola pikir masyarakat, dalam hal membuang sampah terkadang masih sembarangan, oleh karena itu hal tersebut dapat memicu munculnya kawasan kumuh. Sehingga Pemerintah diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat, meskipun merubah pola pikir itu sangat sulit tetapi dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban agar masyarakat dapat mengerti mengenai lingkungan yang bersih dan Kota Yogyakarta juga terhindar dari permasalahan kawasan kumuh.

4.2 SARAN

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya sehingga dapat membantu masyarakat hidup dengan layak, mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas sanitasi dan air bersih, memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang cukup sehingga permasalahan permukiman kumuh dan kawasan kumuh dapat dituntaskan meskipun secara bertahap.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih antusias lagi dalam menangani permukiman kumuh, baik itu dalam proses perencanaan, sosialisasi dan musyawarah masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Jadi tidak perlu membeda-bedakan dengan yang lain hanya karena pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, karena didalam suatu lingkungan yang sehat harus ada kerjasama antar masyarakat sehingga dapat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani permukiman kumuh dan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang istimewa.